SAJARATUN: *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*
e-ISSN: 2809-8293 | https://doi.org/10.37478/sajaratun.v9i2

SAJARATUN: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
website: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sajaratun/
Vol. 11 No. 1 Juni 2026 Hal. 119 - 127

RESEARCH ARTICLE

JURNAL SAJARATUN

KESULTANAN ACEH DARUSSALAM: POLITIK, KEILMUAN DAN JARINGAN ISLAM GLOBAL

Ikhlash Hidayatullah[1], Syamruddin Nasution[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Ikhlashidayatullah0312@gmail.com[1] syamruddin.nst@uin-suska.ac.id[2]

Abstrak

Abstrak
Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu pusat peradaban Islam terpenting di Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-17 yang memainkan peran strategis dalam bidang politik, ekonomi, dan intelektual. Letak geografisnya yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikan Aceh sebagai simpul interaksi antara dunia Timur Tengah, India, dan Nusantara, sekaligus sebagai pusat penyebaran Islam dan pengembangan keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika sejarah Kesultanan Aceh Darussalam dengan menitikberatkan pada aspek politik, perkembangan keilmuan Islam, serta keterhubungannya dalam jaringan Islam global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah (historical research) yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk karya Anthony Reid, Denys Lombard, dan Azyumardi Azra, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan kajian sejarah Islam Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636), yang ditandai dengan ekspansi wilayah, penguatan sistem pemerintahan berbasis Islam, serta dominasi dalam perdagangan internasional. Dalam bidang keilmuan, Aceh berkembang sebagai pusat intelektual dengan hadirnya ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili, yang berkontribusi dalam pembentukan tradisi keislaman di Nusantara. Selain itu, Aceh terintegrasi dalam jaringan ulama global yang menghubungkan kawasan Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah. Namun demikian, kemunduran Aceh dipengaruhi oleh konflik internal, lemahnya stabilitas politik pasca Iskandar Muda, serta tekanan eksternal dari kekuatan kolonial Eropa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya berperan sebagai kekuatan politik regional, tetapi juga sebagai pusat transmisi ilmu dan simpul jaringan Islam global yang berkontribusi besar dalam pembentukan identitas keislaman di Nusantara. Oleh karena itu, kajian terhadap Aceh memiliki relevansi penting dalam memahami dinamika sejarah Islam serta sebagai landasan reflektif dalam merespons tantangan keislaman kontemporer di Indonesia.

Abstract

The Sultanate of Aceh Darussalam was one of the most prominent centers of Islamic civilization in Southeast Asia dur"ng the sixteenth and seventeenth c"ntur'es, playing a strategic role in political, econo"ic, and intellectual domains. Its geographical location along major international trade ro"tes positioned Aceh as a crucial hub connecting the Middle East, India, and the Malay-Indonesian world, while also facilitating the spread of Islam and the development of Islam"c scholarship. This study aims to "ompr'hensively examine the historical dynamics of the Aceh Sultanate, focusing on its political structures, intellectual development, and integration within global Islamic networks. This research employs a qualitativ" approach using historical methods,"including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The data are derived from

Article Info

Naskah diterima: 11 Juni 2026,

Naskah direvisi: 16 Juni 2026,

Naskah disetujui: 18 Juni 2026

Keywords
Kesultanan,
Aceh Darussalam,
Sejarah,
Islam,
Global

an extensive literature review of both primary and secondary sources, including key works by Anthony Reid, Denys Lombard, and Azy'mardi Azra, along with other relevant studies on Islamic history in the Malay-Indonesian world. The findings indicate that Aceh re"ched'its political and economic zenith during the reign of Sultan Iskandar Muda (1607–1636), marked by territorial expansion,'the consolidation of an Islamic-based governance system, and dominance in regional and international trade. In the intellectual sphere, Aceh emerged as a vibrant center of Islamic learning, producing influential scholars such as Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, and Abdurrauf al-Singkili, who significantly contributed to t"e formation of Islamic thought in "he region. Furthermore, Aceh was actively integrated into transregional scholarly networks linking Southeast Asia with major centers of Islamic learning in the Middle East. However, its subsequent decline was shaped by internal political instability and external pressures from European colonial powers. This study concludes that the Aceh"Sultanate functioned not merely as a regional political entity but also as a major center for the transmission of Islamic knowledge and a key node in global Islamic networks. Its historical legacy remains highly relevant for understanding the development of Islamic identity in Indonesia and offers valuable insights for addressing contemporary challenges in the Muslim world.

© 2026 Publikasi Pendidikan Sejarah Uniflor

PENDAHULUAN

Sejarah Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran strategis kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di wilayah-wilayah kunci jalur perdagangan internasional, salah satunya adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Terletak di ujung utara Pulau Sumatra, Aceh memiliki posisi geografis yang sangat vital sebagai simpul pertemuan antara dunia Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Posisi ini menjadikan Aceh bukan hanya sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi peradaban yang mendorong transformasi keagamaan, intelektual, dan sosial. Dalam konteks ini, Aceh tampil sebagai salah satu pusat penting dalam proses islamisasi di kawasan Melayu-Nusantara.

Secara historis, kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam pada awal abad ke-16 tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik kawasan, khususnya pasca jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Peristiwa ini menggeser pusat perdagangan regional sekaligus membuka peluang bagi munculnya kekuatan baru yang mampu menandingi dominasi kolonial Eropa. Aceh kemudian berkembang sebagai kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan, sekaligus melanjutkan tradisi keislaman yang sebelumnya telah dibangun oleh Samudera Pasai. Anthony Reid menegaskan bahwa Aceh mengalami perkembangan pesat karena kemampuannya mengintegrasikan jaringan perdagangan internasional dengan kekuatan politik lokal (Reid, 1988).

Lebih jauh, Kesultanan Aceh Darussalam juga dikenal sebagai pusat keilmuan Islam yang dinamis. Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636), Aceh menjadi magnet bagi para ulama dan intelektual dari berbagai wilayah. Denys Lombard menyebut Aceh sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam terpenting di Asia Tenggara, di mana terjadi interaksi intens antara tradisi lokal dan pengaruh global (Lombard, 2006). Kehadiran tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili menunjukkan bahwa Aceh tidak hanya menjadi penerima arus intelektual, tetapi juga produsen wacana keislaman yang berpengaruh.

Dalam konteks jaringan global, Azyumardi Azra menegaskan bahwa ulama Aceh merupakan bagian dari jaringan intelektual internasional yang terhubung dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah, khususnya Makkah dan Madinah (Azra, 2004). Jaringan ini memungkinkan terjadinya transfer ilmu, otoritas keagamaan, serta pembentukan tradisi intelektual Islam yang khas di Nusantara. Dengan demikian, Aceh tidak dapat dipahami hanya sebagai entitas lokal, melainkan sebagai bagian integral dari jaringan Islam global.

Meskipun telah banyak penelitian tentang Kesultanan Aceh Darussalam, kajian-kajian tersebut menunjukkan kecenderungan tertentu yang perlu dikritisi. Sebagian penelitian klasik lebih menitikberatkan pada aspek politik dan militer, seperti ekspansi kekuasaan dan perlawanan terhadap kolonialisme, sementara aspek intelektual dan jaringan global kurang mendapatkan perhatian yang

memadai. Penelitian Denys Lombard dan Anthony Reid, misalnya, memberikan kontribusi besar dalam memahami struktur ekonomi dan politik Aceh, namun belum secara mendalam mengaitkannya dengan dinamika keilmuan Islam.

Dalam perkembangan penelitian mutakhir, terdapat upaya untuk mengintegrasikan aspek intelektual dan jaringan global dalam studi sejarah Islam Nusantara. Penelitian Azyumardi Azra (2004) menunjukkan pentingnya jaringan ulama dalam membentuk karakter Islam di Nusantara, termasuk di Aceh. Sementara itu, studi-studi terbaru cenderung mengkaji Aceh dari perspektif yang lebih interdisipliner, seperti hubungan antara kekuasaan, agama, dan produksi pengetahuan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara dinamika politik, perkembangan keilmuan, dan jaringan global dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Dalam konteks *state of the art,* dapat dilihat bahwa tren penelitian saat ini mulai mengarah pada pendekatan integratif yang menggabungkan historiografi, studi keislaman, dan analisis jaringan global. Namun, terdapat *research gap* yang cukup jelas, yaitu belum adanya kajian yang secara simultan menganalisis Kesultanan Aceh Darussalam sebagai entitas politik, pusat keilmuan, dan bagian dari jaringan Islam global dalam satu kerangka konseptual yang terpadu. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengaitkan peran historis Aceh dengan relevansinya dalam konteks kontemporer, khususnya dalam membangun identitas keislaman di Indonesia.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu historiografi Islam, teori jaringan intelektual, dan pendekatan peradaban *(civilizational approach).* Pendekatan sejarah digunakan untuk merekonstruksi peristiwa dan dinamika secara kritis, sementara teori jaringan intelektual digunakan untuk memahami hubungan antara ulama Aceh dengan pusat-pusat keilmuan global. Adapun pendekatan peradaban digunakan untuk melihat Aceh sebagai entitas yang tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga budaya dan intelektual yang kompleks.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika politik Kesultanan Aceh Darussalam dalam konteks regional dan global; (2) mengkaji perkembangan keilmuan Islam di Aceh serta kontribusinya terhadap tradisi intelektual Nusantara; dan (3) mengungkap keterhubungan Aceh dalam jaringan ulama internasional serta implikasinya terhadap pembentukan karakter Islam di kawasan ini. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Aceh dalam sejarah Islam.

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi dalam memperkaya kajian sejarah Islam Nusantara dengan menghadirkan perspektif yang lebih integratif dan kritis. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengoreksi kecenderungan historiografi yang selama ini memisahkan antara aspek politik dan keagamaan, serta mengabaikan dimensi intelektual dalam studi tentang kesultanan Islam. Dalam konteks yang lebih luas, kajian ini juga memiliki relevansi kontemporer, terutama dalam memahami akar historis identitas keislaman di Indonesia serta nilai-nilai yang dapat diaktualisasikan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan demikian, Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya dapat dipahami sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga sebagai warisan peradaban yang memiliki nilai strategis bagi masa kini dan masa depan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam membangun kesadaran historis yang lebih mendalam tentang peran Islam dalam membentuk peradaban Nusantara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dengan pendekatan sejarah *(historical research)*, yang bertujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan kritis dinamika Kesultanan Aceh Darussalam dalam perspektif sejarah Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berkaitan dengan peristiwa masa lampau yang memerlukan penelusuran sumber-sumber historis serta interpretasi yang mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan keagamaan pada masanya. Dalam kajian sejarah Islam, metode ini menjadi instrumen utama untuk memahami hubungan antara fakta historis dan perkembangan peradaban.

Secara metodologis, penelitian sejarah dalam studi ini mengikuti tahapan klasik sebagaimana

dirumuskan oleh para ahli historiografi, yaitu *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Louis Gottschalk menjelaskan bahwa penelitian sejarah harus dimulai dari proses pengumpulan sumber *(heuristik)*, dilanjutkan dengan verifikasi melalui kritik sumber, kemudian penafsiran makna, dan diakhiri dengan penulisan sejarah secara sistematis (Gottschalk, 1986). Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki validitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses pengumpulan data dan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi naskah sejarah, hikayat, kronik lokal, serta arsip kolonial yang berkaitan dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Di antaranya adalah Hikayat Aceh yang memberikan gambaran tentang struktur kekuasaan dan kehidupan istana, serta laporan-laporan penjelajah dan arsip kolonial Belanda yang mencatat interaksi politik dan militer Aceh dengan kekuatan Eropa. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari karya-karya akademik modern yang ditulis oleh para sejarawan dan sarjana studi Islam, seperti Anthony Reid, Denys Lombard, dan Azyumardi Azra. Karya-karya tersebut digunakan untuk memberikan kerangka analisis yang lebih luas, serta untuk membandingkan berbagai perspektif dalam memahami sejarah Aceh.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang merupakan proses penting untuk menilai keabsahan dan kredibilitas data historis. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk menguji autentisitas sumber, seperti keaslian dokumen, waktu penulisan, serta identitas peneliti. Dalam konteks ini, sumber-sumber seperti Hikayat Aceh dianalisis dengan mempertimbangkan latar belakang penulis dan tujuan penulisannya, sehingga dapat diketahui sejauh mana objektivitasnya. Adapun kritik internal bertujuan untuk menilai isi atau substansi sumber, termasuk konsistensi informasi, bias penulis, serta relevansi data dengan konteks sejarah yang diteliti. Marc Bloch menekankan bahwa sejarawan harus bersikap kritis terhadap sumber, karena setiap dokumen sejarah tidak pernah sepenuhnya netral (Bloch, 1953). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menerima data secara apa adanya, tetapi juga melakukan verifikasi silang (cross-checking) antar sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta historis yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami makna di balik peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan keagamaan. Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan perspektif sejarah, studi Islam, dan analisis sosial. Dengan demikian, peristiwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai fakta kronologis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika peradaban yang lebih luas.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis dan argumentatif. Penulisan historiografi dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk merekam peristiwa masa lalu, tetapi juga untuk memberikan analisis kritis terhadap perkembangan Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam hal ini, pendekatan naratif-analitis digunakan untuk mengintegrasikan data historis dengan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya. Selain pendekatan historis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dalam studi Islam, khususnya dalam memahami peran Aceh sebagai pusat keilmuan dan jaringan ulama. Konsep jaringan ulama yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis hubungan intelektual antara Aceh dan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat Aceh sebagai bagian dari sistem global, bukan sekadar entitas lokal.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan telah diakui dalam kajian akademik. Selain itu, analisis dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada kerangka metodologis yang jelas. Lexy J. Moleong (2017) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat bergantung pada ketepatan dalam pemilihan sumber dan ketelitian dalam proses analisis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjaga keseimbangan antara kedalaman analisis dan ketepatan metodologis. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk

mengumpulkan data, tetapi juga sebagai kerangka ilmiah yang memastikan bahwa setiap kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat. Pendekatan historis yang dikombinasikan dengan analisis kritis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Kesultanan Aceh Darussalam sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesultanan Aceh Darussalam Dalam Sejarah

Pembahasan mengenai Kesultanan Aceh Darussalam tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah regional dan global yang melingkupinya. Aceh muncul bukan dalam ruang kosong, melainkan sebagai respons terhadap perubahan geopolitik yang terjadi di Asia Tenggara pada awal abad ke-16. Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 menjadi titik balik penting yang menggeser pusat perdagangan sekaligus memicu lahirnya kekuatan-kekuatan baru di kawasan, termasuk Aceh. Dalam situasi tersebut, Aceh tidak hanya mengambil peran sebagai penerus Samudera Pasai, tetapi juga sebagai simbol resistensi terhadap dominasi kolonial sekaligus pusat kebangkitan Islam di wilayah barat Nusantara. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Mughayat Syah menandai fase awal konsolidasi politik yang cukup signifikan. Ia berhasil menyatukan wilayah-wilayah kecil di pesisir utara Sumatra dan membangun fondasi kekuasaan yang relatif stabil. Menurut catatan sejarah, ekspansi awal Aceh difokuskan pada penguasaan pelabuhan-pelabuhan strategis, yang menjadi kunci dalam mengontrol jalur perdagangan regional. Strategi ini menunjukkan bahwa sejak awal, Aceh telah memahami pentingnya integrasi antara kekuatan politik dan ekonomi.

Memasuki abad ke-17, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Dalam historiografi modern, periode ini sering disebut sebagai "zaman keemasan" Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup sebagian besar Sumatra dan wilayah Semenanjung Melayu, termasuk Pahang dan Kedah. Denys Lombard mencatat bahwa ekspansi ini tidak hanya bertujuan memperluas wilayah, tetapi juga untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperkuat posisi Aceh dalam persaingan regional (Lombard, 2006).

Sisi militer, Aceh dikenal sebagai kekuatan yang cukup tangguh dalam menghadapi Portugis. Beberapa serangan besar terhadap Malaka dilakukan, meskipun tidak selalu berhasil mengusir Portugis secara permanen. Namun demikian, perlawanan ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki kapasitas militer yang kuat serta semangat jihad yang tinggi dalam menghadapi kekuatan asing. Anthony Reid menilai bahwa Aceh merupakan salah satu kerajaan di Asia Tenggara yang paling konsisten dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Eropa (Reid, 1988).

Dalam bidang ekonomi, Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan internasional yang sangat penting. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, yang pada masa itu memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Aceh menjadi tujuan para pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Arab, India, Persia, dan bahkan Eropa. Data historis menunjukkan bahwa pelabuhan Aceh menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai ruang interaksi budaya dan intelektual. Namun, kekuatan Aceh tidak hanya terletak pada aspek politik dan ekonomi. Salah satu ciri khas yang membedakan Aceh dari kerajaan lain adalah perannya sebagai pusat keilmuan Islam. Pada masa Iskandar Muda dan penerusnya, Aceh menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai latar belakang. Hamzah Fansuri, misalnya, dikenal sebagai pelopor tasawuf falsafi di Nusantara dengan ajaran wujudiyah yang menekankan kesatuan eksistensi antara Tuhan dan makhluk. Pemikirannya kemudian dilanjutkan oleh Syamsuddin as-Sumatrani, yang memiliki pengaruh besar di lingkungan istana. Namun, perkembangan intelektual ini tidak selalu berjalan tanpa konflik. Kedatangan Nuruddin ar-Raniri pada masa Sultan Iskandar Tsani membawa perubahan signifikan dalam wacana keagamaan di Aceh. Ia mengkritik keras ajaran wujudiyah yang dianggapnya menyimpang, dan mendorong pendekatan teologi yang lebih ortodoks. Perdebatan ini menunjukkan bahwa Aceh merupakan ruang intelektual yang dinamis, di mana berbagai pemikiran keislaman berkembang dan saling berinteraksi.

Tokoh lain yang tidak kalah penting adalah Abdurrauf as-Singkili, yang dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tafsir dan tasawuf. Karyanya, Tarjuman al-Mustafid, merupakan salah satu tafsir Al-Qur'an pertama dalam bahasa Melayu, yang memiliki pengaruh luas di Nusantara. Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa Aceh tidak hanya menjadi pusat penerimaan ilmu, tetapi juga pusat produksi pengetahuan yang berkontribusi pada perkembangan Islam di kawasan.

Dalam kehidupan sosial, penerapan syariat Islam menjadi bagian integral dari sistem masyarakat Aceh. Hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam muamalah dan tata pemerintahan. Lembaga pendidikan seperti dayah berkembang pesat dan menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Aceh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Aceh juga memainkan peran penting dalam jaringan Islam global. Hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmani menjadi bukti bahwa Aceh tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan dunia Islam yang lebih luas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Aceh pernah meminta bantuan militer dari Utsmani dalam menghadapi Portugis, yang menunjukkan adanya solidaritas antar kekuatan Islam pada masa itu. Namun, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Konflik internal, terutama perebutan kekuasaan, melemahkan stabilitas politik. Selain itu, perubahan dalam jalur perdagangan global serta meningkatnya kekuatan kolonial Eropa turut mempercepat proses kemunduran tersebut. Meskipun sempat dipimpin oleh beberapa sultanah, seperti Sultanah Safiatuddin Syah, upaya untuk mempertahankan kejayaan Aceh menghadapi tantangan yang semakin berat.

Memasuki abad ke-19, Aceh menghadapi tekanan besar dari Belanda yang berusaha menguasai seluruh wilayah Nusantara. Perang Aceh yang berlangsung sejak 1873 menjadi salah satu konflik paling panjang dan berdarah dalam sejarah kolonial Indonesia. Perlawanan rakyat Aceh, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien, menunjukkan bahwa semangat perjuangan berbasis agama tetap menjadi kekuatan utama dalam menghadapi penjajahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam merupakan entitas yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya berperan sebagai kekuatan politik, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam. Integrasi antara kekuasaan, ekonomi, dan keilmuan menjadi kunci utama dalam menjelaskan kejayaan Aceh. Namun, faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi juga menjadi penyebab kemundurannya. Dengan demikian, sejarah Aceh tidak hanya memberikan gambaran tentang masa lalu, tetapi juga menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana suatu peradaban dibangun, dipertahankan, dan pada akhirnya mengalami transformasi. Analisis ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut pada bab berikutnya, yang akan mengkaji secara kritis makna dan implikasi dari dinamika sejarah tersebut.

2. Analisis Kritis: Historiografi, Perspektif, Dan Makna Strategis Aceh

Pembahasan mengenai Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya memerlukan rekonstruksi sejarah secara deskriptif, tetapi juga menuntut pembacaan kritis terhadap cara sejarah tersebut ditulis dan dipahami. Dalam konteks ini, historiografi memainkan peran penting, karena setiap narasi sejarah pada dasarnya merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh perspektif, kepentingan, dan kerangka berpikir penulisnya. Oleh karena itu, analisis terhadap Aceh harus mencakup evaluasi terhadap sumber-sumber historiografis yang digunakan, baik yang berasal dari tradisi Barat maupun dari perspektif Islam.

Dalam historiografi Barat, khususnya yang berkembang pada masa kolonial, Aceh sering kali digambarkan sebagai wilayah yang "resisten" dan "militan," terutama dalam konteks perlawanannya terhadap kekuatan Eropa. Narasi ini dapat ditemukan dalam laporan-laporan kolonial Belanda yang cenderung menempatkan Aceh sebagai objek yang harus "ditundukkan" demi stabilitas dan kepentingan ekonomi kolonial. Perspektif semacam ini, meskipun memiliki nilai dokumenter, tidak sepenuhnya netral, karena dipengaruhi oleh kepentingan politik kolonial. Edward Said dalam konsep Orientalism menegaskan bahwa pengetahuan tentang dunia Timur sering kali dibentuk dalam kerangka dominasi, sehingga menghasilkan representasi yang bias dan reduktif (Said, 1978).

Dalam konteks Aceh, bias ini terlihat dalam kecenderungan untuk mengabaikan dimensi intelektual dan keagamaan, serta lebih menekankan aspek konflik dan kekerasan. Padahal, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, Aceh merupakan pusat keilmuan Islam yang memiliki kontribusi signifikan dalam jaringan intelektual global. Oleh karena itu, pembacaan terhadap sumber-sumber kolonial harus dilakukan secara kritis, dengan mempertimbangkan konteks produksi pengetahuan tersebut. Sebaliknya, dalam perspektif historiografi Islam, Aceh sering digambarkan sebagai pusat peradaban Islam yang gemilang, dengan penekanan pada peran ulama, penerapan syariat, serta kontribusinya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sumber-sumber seperti Hikayat Aceh dan karya-karya ulama lokal memberikan gambaran yang lebih positif, namun tidak lepas dari unsur legitimasi kekuasaan dan idealisasi. Dalam hal ini, tantangan metodologis muncul dalam menyeimbangkan antara narasi yang cenderung apologetik dengan kebutuhan akan analisis yang objektif.

Dengan demikian, pendekatan historiografi yang digunakan dalam penelitian ini berupaya untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara kritis. Sumber-sumber Barat digunakan untuk memahami dinamika eksternal dan interaksi Aceh dengan kekuatan global, sementara sumber-sumber Islam digunakan untuk menggali dimensi internal, khususnya dalam aspek keagamaan dan intelektual. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya pemahaman yang lebih komprehensif dan tidak terjebak pada dikotomi yang sempit. Selain aspek historiografi, analisis kritis juga perlu diarahkan pada relasi antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan di Aceh. Dalam banyak kajian, hubungan ini sering dipahami sebagai bentuk integrasi yang harmonis. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, terdapat dinamika yang lebih kompleks, termasuk adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama yang berpengaruh terhadap kebijakan politik. Perdebatan antara Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniri, misalnya, tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi politik dalam menentukan arah keagamaan kesultanan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Aceh bukanlah entitas yang homogen, melainkan ruang yang dinamis di mana berbagai kepentingan dan pemikiran saling berinteraksi. Dalam konteks ini, peran sultan menjadi sangat penting sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep siyāsah shar'iyyah yang menempatkan pemimpin sebagai pengelola kemaslahatan umum, bukan sekadar penguasa absolut. Lebih jauh, makna strategis Kesultanan Aceh Darussalam dapat dilihat dalam posisinya sebagai penghubung antara dunia Islam dan kawasan Asia Tenggara. Aceh tidak hanya menerima pengaruh dari luar, tetapi juga berperan aktif dalam mentransmisikan ilmu dan tradisi keislaman ke wilayah lain di Nusantara. Dalam kerangka teori jaringan ulama, Aceh dapat dipahami sebagai simpul penting dalam arus pertukaran intelektual yang melibatkan Makkah, Madinah, India, dan wilayah Melayu.

Azyumardi Azra menegaskan bahwa jaringan ulama ini berperan dalam membentuk karakter Islam Nusantara yang moderat dan terbuka terhadap berbagai pengaruh (Azra, 2004). Dalam konteks ini, Aceh memiliki kontribusi strategis sebagai pusat produksi dan distribusi pengetahuan, yang tidak hanya berdampak pada masa lalu, tetapi juga membentuk tradisi keilmuan yang berlanjut hingga saat ini. Namun demikian, analisis kritis juga perlu mengakui bahwa kejayaan Aceh tidak bersifat permanen. Ketergantungan pada perdagangan komoditas tertentu, seperti lada, membuat ekonomi Aceh rentan terhadap perubahan pasar global. Selain itu, struktur politik yang bergantung pada figur sultan menyebabkan stabilitas kerajaan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Ketika kepemimpinan melemah, konflik internal menjadi sulit dihindari.

Sisi lain, tekanan eksternal dari kekuatan kolonial Eropa menunjukkan bahwa Aceh berada dalam sistem global yang tidak selalu menguntungkan. Dalam hal ini, keunggulan militer dan ekonomi yang dimiliki Aceh pada masa tertentu tidak cukup untuk menghadapi perubahan teknologi dan strategi yang dibawa oleh kolonialisme modern. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuatan peradaban tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global.

Dalam konteks kontemporer, makna strategis Aceh dapat direfleksikan dalam upaya membangun kembali identitas keislaman yang berakar pada sejarah. Aceh sebagai "Serambi Mekkah" bukan

hanya simbol, tetapi representasi dari warisan intelektual dan spiritual yang memiliki nilai relevansi hingga saat ini. Oleh karena itu, kajian terhadap Aceh tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga memiliki dimensi prospektif dalam memahami arah perkembangan Islam di Indonesia. Secara keseluruhan, analisis kritis ini menegaskan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam harus dipahami sebagai entitas yang kompleks, yang tidak dapat direduksi hanya pada satu perspektif. Integrasi antara pendekatan historiografi, analisis politik, dan studi keislaman menjadi kunci dalam menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Dengan demikian, Aceh tidak hanya menjadi objek kajian sejarah, tetapi juga sumber refleksi bagi pembangunan peradaban Islam di masa kini dan masa depan.

3. Implikasi Dan Relevansi Kontemporer

Kajian terhadap Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menyimpan implikasi penting bagi pengembangan pemikiran dan praktik keislaman di era kontemporer. Dalam konteks modern yang ditandai oleh globalisasi, disrupsi teknologi, dan dinamika sosial yang kompleks, sejarah Aceh dapat menjadi sumber refleksi dalam membangun kembali hubungan yang harmonis antara agama, kekuasaan, dan masyarakat. Salah satu implikasi utama yang dapat diambil adalah pentingnya integrasi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik dalam kerangka yang proporsional. Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa legitimasi politik yang kuat sering kali bertumpu pada dukungan moral dan intelektual dari ulama. Namun demikian, sejarah juga mengajarkan bahwa hubungan tersebut harus dikelola secara seimbang agar tidak menimbulkan dominasi salah satu pihak yang dapat menghambat dinamika pemikiran. Dalam konteks Indonesia modern, hal ini relevan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang menghargai nilai-nilai agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralitas.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan penguatan tradisi keilmuan Islam. Aceh pada masa kejayaannya menunjukkan bahwa kemajuan peradaban tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan ulama yang terhubung dalam jaringan global memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan yang memperkaya khazanah keilmuan. Dalam era kontemporer, semangat ini dapat direaktualisasikan melalui penguatan lembaga pendidikan Islam, peningkatan kualitas riset, serta keterlibatan aktif dalam diskursus global. Dengan demikian, warisan intelektual Aceh dapat menjadi inspirasi dalam membangun tradisi keilmuan yang adaptif dan berdaya saing. Selain itu, relevansi sejarah Aceh juga terlihat dalam konteks identitas keislaman Indonesia. Aceh sebagai "Serambi Mekkah" mencerminkan karakter Islam yang memiliki akar sejarah kuat sekaligus terbuka terhadap interaksi global. Nilai-nilai seperti toleransi, keterbukaan, dan semangat keilmuan yang berkembang di Aceh dapat menjadi rujukan dalam menghadapi tantangan radikalisme dan fragmentasi sosial. Dalam hal ini, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat membimbing arah perkembangan masyarakat.

Sisi lain, pengalaman kemunduran Aceh memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya stabilitas politik dan adaptasi terhadap perubahan global. Ketergantungan pada komoditas tertentu serta konflik internal menjadi faktor yang melemahkan daya tahan kerajaan. Dalam konteks saat ini, hal tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya diversifikasi ekonomi, penguatan institusi, serta kemampuan merespons perubahan secara strategis. Dengan demikian, sejarah Aceh tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga peringatan terhadap potensi kelemahan yang perlu diantisipasi. Lebih jauh, dalam era digital dan globalisasi, konsep jaringan ulama yang pernah berkembang di Aceh dapat direinterpretasi dalam bentuk jaringan intelektual modern. Kolaborasi antar akademisi, ulama, dan institusi pendidikan lintas negara menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang bersifat kompleks. Dalam hal ini, semangat konektivitas yang telah dibangun oleh ulama Aceh di masa lalu dapat menjadi model dalam membangun jejaring keilmuan yang lebih luas dan inklusif.

Dengan demikian, implikasi dan relevansi kontemporer dari sejarah Kesultanan Aceh Darussalam menunjukkan bahwa warisan masa lalu memiliki nilai strategis dalam membentuk masa depan. Melalui pembacaan yang kritis dan kontekstual, sejarah Aceh dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun peradaban Islam yang moderat, berilmu, dan berdaya saing di tingkat global

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu pusat peradaban Islam yang memiliki peran signifikan dalam sejarah Nusantara dan dunia Islam secara lebih luas. Keberhasilannya dalam mengintegrasikan kekuatan politik, ekonomi, dan keilmuan menjadikan Aceh sebagai entitas yang tidak hanya berpengaruh secara regional, tetapi juga terhubung dalam jaringan Islam global.

Dinamika sejarah Aceh menunjukkan bahwa kejayaan suatu peradaban sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola berbagai aspek kehidupan secara seimbang. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan melalui stabilitas politik, kekuatan militer, serta kemajuan ekonomi dan intelektual. Keberadaan ulama dan berkembangnya tradisi keilmuan menjadi faktor penting yang memperkuat legitimasi dan daya tahan kerajaan. Namun demikian, kemunduran Aceh juga menunjukkan bahwa peradaban tidak bersifat statis. Konflik internal, lemahnya kepemimpinan, serta tekanan eksternal dari kolonialisme menjadi faktor yang mempercepat proses kemunduran. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan suatu peradaban memerlukan kemampuan adaptasi terhadap perubahan serta pengelolaan konflik secara efektif.

Perspektif historiografi, kajian ini menunjukkan pentingnya pendekatan kritis dalam memahami sejarah. Integrasi antara sumber-sumber Barat dan Islam memungkinkan terbentuknya pemahaman yang lebih komprehensif dan tidak bias. Dengan demikian, sejarah Aceh tidak hanya dipahami sebagai narasi masa lalu, tetapi juga sebagai konstruksi pengetahuan yang terus berkembang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam memiliki makna strategis dalam pembentukan peradaban Islam di Nusantara. Warisan sejarahnya tidak hanya penting untuk dipahami, tetapi juga untuk diaktualisasikan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Oleh karena itu, kajian terhadap Aceh perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkaya khazanah keilmuan dan memperkuat identitas keislaman di Indonesia.

REFERENSI

Abdullah, T. (1991). *Sejarah umat Islam Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.

Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Kencana.

Bloch, M. (1953). *The historian's craft.* Manchester University Press.

Gottschalk, L. (1986). *Understanding history: A primer of historical method. Alfred A*. Knopf.

Lombard, D. (2006). *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636).* Balai Pustaka.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Reid, A. (1988). Southeast Asia in the age of commerce 1450–1680: Vol. 2. Expansion and crisis. Yale University Press.

Ricklefs, M. C. (2008*). A history of modern Indonesia* since c. 1200. Stanford University Press.

Said, E. W. (1978). *Orientalism.* Vintage Books.